

**PEMANFAATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
(CSR) BAGI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP  
MANUSIA INDONESIA**

*The Influence of Corporate Social Responsibility  
Toward the Improvement of Quality of Life In Indonesia*

**Herlina Astri**

*Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Naskah diterima: 10 Juni 2012  
Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012

**Abstract:** *Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia should adapt to local situation and characteristics of the human being. This paper aims at elaborating the implementation and benefits of CSR in Indonesia. The writing process was conducted by consulting a number of sources to draw conclusions. The results show that the realization of CSR to its surrounding community can be done through a variety of community development programs. It is a new way to frame sustainable benefits of CSR to society maximizing building potential.*

**Keyword:** *CSR, Quality of Life, Socio-Economic Welfare.*

**Abstrak:** *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, sebaiknya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi lokal karakteristik manusianya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai pelaksanaan dan manfaat CSR di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan mencari acuan dari berbagai sumber-sumber referensi dan menarik simpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitarnya dapat dilakukan dengan membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Ini merupakan suatu cara baru untuk memberikan manfaat CSR secara berkelanjutan pada masyarakat dengan membangun potensi yang dimilikinya.*

**Kata kunci:** *CSR, kualitas hidup, kesejahteraan sosial-ekonomi.*

## Pendahuluan

Tanggung jawab terhadap perwujudan kesejahteraan sosial pada sebuah negara, tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga melibatkan peran serta pihak lainnya. Salah satu contoh adalah perusahaan-perusahaan dan bidang industri yang sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Jejaring kerja dan kemitraan pemerintah bersama pihak lain tersebut merupakan salah satu strategi, yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan sosial selama ini. Selain mengupayakan kehidupan yang layak bagi masyarakat, keterlibatan pihak-pihak tersebut juga disertai tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kestabilan lingkungan hidup dan sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di berbagai bidang, sehingga tercipta interaksi yang sehat antara perusahaan-perusahaan dan bidang industri dengan masyarakat di sekitarnya.

Wujud riil interaksi yang baik antara kedua belah pihak dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk kemajuan dan kebaikan masyarakat sekitar. Pembentukan hubungan ini didasari adanya *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sampai saat ini pendefinisianya masih menjadi perdebatan di antara para praktisi maupun akademisi. Sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar, tantangan utamanya adalah memberikan pemaknaan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Lebih tepatnya sebelum mengimplementasikan CSR ini, sebaiknya diadaptasi dengan situasi dan kondisi lokal di Indonesia. Hal ini akan sangat membantu pelaksanaan

CSR agar tidak disalahgunakan, terutama dalam memajukan kualitas hidup manusia di Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai pelaksanaan dan manfaat CSR di Indonesia, yang seharusnya dapat dijadikan modal bagi peningkatan kualitas manusianya. Selama ini CSR justru dijadikan alasan oleh beberapa pihak untuk menghindari kewajibannya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menjadi tameng bagi perusahaan-perusahaan yang sebenarnya memiliki dampak negatif pada pencemaran lingkungan.

## Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Mencari acuan dari berbagai sumber-sumber referensi. Pencarian sumber-sumber referensi bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai fenomena yang sedang dibahas. Hal ini dilakukan dengan membahas secara teoretis hal-hal yang berkaitan dengan topik yang diambil. Penulisan dilakukan dengan mengumpulkan data dari teks-teks tertulis, berupa buku, *ebook*, artikel-artikel, dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan untuk data yang berupa *soft-copy edition* diperoleh dari sumber-sumber internet *online* yang relevan dengan pembahasan masalah.
2. Melakukan pengkajian terhadap fenomena yang akan dibahas. Pengkajian dilakukan setelah semua referensi diperoleh, sehingga dapat terlihat jelas apakah CSR benar-benar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

3. Mengambil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Proses akhir dari penulisan adalah menarik sebuah simpulan, yang dilengkapi dengan penjelasan dan saran-saran untuk perbaikan pelaksanaan CSR ke depannya.

### **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan “perbuatan baik” (atau kedermawanan seperti misalnya yang dilakukan oleh *Habitat for Humanity* atau *Ronald McDonald House*).<sup>1</sup> Ini mengisyaratkan adanya kemungkinan CSR berawal dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan. Pada hakikatnya sumbangan sosial tetap menjadi salah satu bagian kecil dari CSR. Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.<sup>2</sup>

Menurut Saidi dan Abidin (2004: 59-60), sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis melainkan juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis.

1. Tanggung jawab ekonomis (*make a profit*); Di sini motif perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba merupakan fondasi utama perusahaan, sehingga merujuk pada nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal (*obey the law*); Dalam proses pencarian laba,

perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Tanggung jawab etis (*be ethical*); Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.
4. Tanggung jawab filantropis (*be a good citizen*); Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

Dari keempat klasifikasi tersebut, terlihat jelas bahwa CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal atau pemberian sumbangan sosial. CSR mengharuskan perusahaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan internal yang diperhitungkan secara tepat, dalam memutuskan perlakuan pada lingkungan sekitarnya. Schermerhorn (1993) dalam Suharto (2007:102) memberikan definisi “CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal.” Sedangkan Nuryana (2005) dalam Suharto (2007:102) menekankan bahwa CSR merupakan pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan

<sup>1</sup> “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” [http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan), diakses tanggal 17 Juli 2012.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Pengertian dan pemahaman tentang CSR di setiap kalangan tentu berbeda. Sesungguhnya CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan, dalam segala aspek operasional perusahaan.<sup>3</sup> Kebijakan dan program ini tidak dilakukan hanya untuk tujuan mengikuti kecenderungan semata, melainkan karena adanya motivasi-motivasi yang lain. Seperti yang diungkapkan Saidi dan Abidin (2004:83) bahwa:

Ada motivasi yang menyertai pelaksanaan CSR yaitu motivasi keagamaan untuk beramal sebanyak mungkin (*corporate charity*), motivasi humanis untuk menolong sesama (*corporate philanthropy*), dan motivasi kewarnagegaraan untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat (*corporate citizenship*).

Selain ketiga motivasi tersebut, Tania (2012:83) menambahkan: “Terdapat motivasi lain perusahaan atas manfaat CSR baik bagi perusahaan maupun masyarakat karena strategi dan implementasi yang tepat sasaran akan mampu berkontribusi positif.” Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksanaan CSR yang dilakukan sebenarnya tidak berimbas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar saja, tetapi juga mampu memberikan investasi kepercayaan masyarakat untuk jangka panjang pada sebuah perusahaan. Kondisi tersebut akan mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sehingga perusahaan memperoleh loyalitas dari masyarakat

<sup>3</sup> *Ibid.*

untuk mendukung kegiatan produksinya.

Oleh karena itu jika tujuan ekonomi dan sosial dianggap terpisah dan bertentangan, hal ini merupakan pandangan yang keliru. CSR harus dilihat sebagai satu kesatuan yang menjadi kepedulian perusahaan dengan dasar tiga prinsip (*triple bottom lines*) seperti yang dikemukakan oleh Elkington (1998:79) sebagai berikut:

1. *Profit*; Perusahaan tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
2. *People*; Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR, seperti: pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, bahkan ada beberapa perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.
3. *Planet*; Perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup dan kelangsungan keragaman hayati. Beberapa CSR memang telah berpijak pada prinsip ini, umumnya berupa penghijauan, penyediaan air bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme).

Selain ketiga prinsip tersebut Suharto (2007) menambahkan prinsip *procedure*. Menurutnya ketiga prinsip di atas dapat berjalan dengan baik jika melalui prosedur terpadu. Dapat dimaklumi bahwa prinsip baru tersebut tidak hanya terkait perizinan saja tetapi juga dalam pelaksanaan komitmen perusahaan yang ditujukan untuk kehidupan orang banyak. Kemungkinan besar, prinsip inilah yang sering dilupakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia

sehingga pelaksanaan CSR kurang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup manusia.

### **Kualitas Hidup Manusia**

Salah satu bentuk kualitas manusia dan kualitas masyarakat adalah kualitas hidup yang awalnya merupakan keluaran dari kualitas manusia. Secara teoretis, manusia yang berkualitas, misalnya cerdas, berpendidikan dan yang sehat, akan selalu meningkatkan kualitasnya dan sekaligus sebagai anggota masyarakat akan ikut membantu meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. (Faturachman, 1990) Kualitas hidup menjadi salah satu indikator untuk menentukan penilaian terhadap pencapaian kesejahteraan pada sebuah negara. Hal ini dapat dilihat secara riil dengan adanya peningkatan penghasilan, kualitas perumahan, kesehatan yang baik, pendidikan bagi semua warga negara, perlakuan yang sama di bidang hukum, kemerdekaan untuk berserikat, dan sebagainya.

Felce dan Perry (1995:51) mengatakan bahwa, “terdapat banyak definisi kualitas hidup dengan jumlah yang sama dengan jumlah manusia.” Hal ini menunjukkan untuk pendefinisian kualitas hidup setiap orang memiliki pemahamannya masing-masing. Selain itu juga mengindikasikan bahwa kualitas hidup merupakan sebuah konsep yang lebih bersifat subjektif. Liu menambahkan bahwa, “Sifat subjektif dari kualitas hidup ini membuat konseptualisasi dari kualitas hidup bervariasi antara satu peneliti dengan yang lain.” Moon.G, et.al (2004:1) menyebutkan bahwa:

Ada beberapa hal penting dalam konseptualisasi kualitas hidup yaitu: a) kualitas hidup tidak boleh disamakan dengan status kesehatan ataupun kemampuan fungsional; b) kualitas

hidup lebih didasarkan oleh evaluasi subjektif daripada parameter objektif; c) tidak terdapat perbedaan yang jelas antara indikator-indikator kualitas hidup dengan faktor-faktor yang menentukan kualitas hidup; d) kualitas hidup dapat berubah seiring waktu namun tidak banyak; dan e) kualitas hidup dapat dipengaruhi secara positif maupun negatif.

Kelima kriteria itu menjadi pertimbangan untuk mendefinisikan kualitas hidup sebagai berikut, “*The degree of overall life satisfaction that is positively or negatively influenced by individuals perception of certain aspects of life important to them.*” (Moon.G, et.al: 2004:2). Definisi ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya kualitas hidup sangat bergantung pada persepsi masing-masing individu mengenai beberapa aspek kehidupan yang penting menurut pemahamannya. Tidak ada pendefinisian kualitas hidup yang bersifat kaku sesuai dengan perkembangan kondisi, intelektual, dan situasi, yang dialami oleh seseorang. WHO bahkan membuat definisi yang sedikit berbeda, yaitu:

Kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam kehidupan dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka tinggal, serta hubungannya dengan tujuan, harapan, standar, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian individu.

Penegasan ini menunjukkan bahwa terdapat penekanan pada persepsi individu mengenai posisi kehidupan mereka saat ini dan persepsi tersebut dapat dipengaruhi baik oleh budaya maupun sistem nilai yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Pemaknaan yang berbeda mengenai kualitas hidup akhirnya memberikan ide bagi Felce dan Perry (1995:68) untuk melakukan *review* literatur-literatur dari berbagai penelitian yang menghasilkan aspek-aspek kualitas hidup. Felce dan Perry mengelompokkan

aspek-aspek kualitas hidup menjadi lima yaitu:

- a. Aspek *physicall wellbeing*; Terdiri dari aspek-aspek kesehatan, kebugaran, keamanan fisik, dan mobilitas.
- b. Aspek *material wellbeing*; Terdiri dari aspek-aspek pendapatan, kualitas lingkungan hidup, *privacy*, kepemilikan, makanan, alat transportasi, lingkungan tempat tinggal, keamanan, dan stabilitas).
- c. Aspek *social wellbeing*; Terdiri dari hubungan interpersonal dan keterlibatan dalam masyarakat.
- d. Aspek *development and activity*; Terdiri dari pekerjaan, rekreasi, pekerjaan rumah tangga, pendidikan, dan produktivitas.
- e. Aspek *emotional wellbeing*; Terdiri dari *mood*, kepuasan atau pemenuhan kebutuhan, kepercayaan diri, agama, dan status/ kehormatan.

Felce dan Perry (1995:23) juga menyebutkan bahwa, "Ada tiga komponen dalam pengukuran kualitas hidup yaitu komponen objektif, komponen subjektif, dan komponen kepentingan." Masing-masing komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komponen objektif berkaitan dengan data objektif atau kondisi kehidupan yang sebenarnya pada berbagai aspek kehidupan;
- b. Komponen subjektif merupakan penilaian individu mengenai kondisi kehidupannya saat ini pada berbagai aspek kehidupan; dan
- c. Komponen kepentingan merupakan ukuran seseorang pada seberapa penting suatu aspek kehidupan dalam memengaruhi kualitas hidup individu.

Jika diasumsikan maka terlihat bahwa komponen subjektif dan komponen kepentingan keduanya saling berinteraksi

dan memengaruhi satu sama lain. Sementara itu perubahan komponen objektif berupa kondisi objektif dimungkinkan memengaruhi perubahan baik pada komponen subjektif maupun komponen kepentingan dari kualitas hidup.

Terdapat 3 kriteria yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia/ kualitas taraf hidup manusia, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan sebagai makhluk hidup hayati; Kebutuhan ini bersifat mutlak, yang didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup hayatinya. Kelangsungan hidup hayati tidak hanya menyangkut dirinya, melainkan juga masyarakatnya, dan terutama kelangsungan hidupnya sebagai jenis melalui keturunannya. Kebutuhan dasar ini terdiri atas tanah, air bersih, udara, sandang, pangan, dan tempat tinggal untuk memperoleh melanjutkan keturunan serta perlindungan dari serangan penyakit, serangan binatang buas, dan sesama manusia sendiri;
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup secara manusiawi; Berbeda dengan makhluk hidup yang lain, manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak cukup hanya sekedar hidup secara hayati. Namun dikarenakan perkembangan kebudayaannya maka manusia harus hidup secara manusiawi. Kebutuhan dasar untuk hidup secara manusiawi sebagian bersifat material dan sebagian lagi bersifat nonmaterial. Pekerjaan bukan sekedar sumber

<sup>4</sup> [http://id.kawalborneo.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=84:kriteria-pengukuran-kualitas-hidup-kualitas-taraf-hidup-&catid=37:berita&Itemid=60](http://id.kawalborneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84:kriteria-pengukuran-kualitas-hidup-kualitas-taraf-hidup-&catid=37:berita&Itemid=60), diakses tanggal 30 Juni 2012.

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hayati, tetapi juga perlu diberikan pengetahuan tentang agama, filsafat, ilmu, seni dan budaya. Oleh karena itu perlindungan hukum yang adil merupakan kebutuhan dasar yang membuat manusia dapat hidup secara manusiawi;

- c. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk dapat memilih; Dalam tatanan hidup masyarakat yang tertib, derajat kebebasan untuk memilih dibatasi oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemampuan memilih merupakan sifat hakiki untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Memutuskan sebuah pilihan tentu harus bertemu dengan keanekaragaman pilihan lainnya. Oleh karena itu keanekaragaman merupakan unsur yang esensial dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungannya.

Menurut *Organization of Economic and Development* (OECD) indikator kualitas hidup memang secara riil dapat terlihat dalam tingkat pendapatan, kepemilikan tempat tinggal, lingkungan yang sehat, stabilitas sosial, kesehatan, dan adanya kesempatan kerja. (Faturchman, 1990) Meskipun demikian sebenarnya jika ditinjau lebih jauh, ada keterkaitan antara peningkatan kualitas hidup dengan kualitas manusia yang dihasilkan, contoh: pendapatan yang tinggi tentunya memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang layak dan peningkatan gizi yang baik bagi anak sehingga generasi baru yang dihasilkan menjadi lebih baik kualitasnya.

### **Pelaksanaan CSR di Indonesia**

Program-program CSR yang telah dilakukan sejak tahun 2000-an

hanya memiliki dua kategori pilihan, yaitu meminimumkan dampak negatif (kompensasi) atau memaksimalkan dampak positif. Pengategorian ini muncul akibat pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang hanya didasarkan pada pemangku kepentingan saja. Ini berarti program CSR perusahaan dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, yang didekati (langsung atau melalui fasilitator) untuk mengetahui pandangannya tentang apa yang seharusnya dilakukan.

Di Indonesia pemahaman mengenai CSR telah masuk pada tahapan pertumbuhan, baik secara konseptual maupun praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa makin lama masyarakat Indonesia semakin cerdas untuk menerima dan memaknai CSR sebagai salah satu pendukung kelangsungan hidupnya. Pola seperti ini semestinya mendapatkan respon positif dari pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kontribusi CSR dalam pembangunan di Indonesia, termasuk peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang CSR cenderung pada bentuk tanggung jawab filantropinya. Hal ini memang menjadi pemikiran utama, sebab yang terlihat jelas perusahaan-perusahaan berlomba untuk menyampaikan bentuk tanggung jawab filantropi dengan basis kebutuhan riil masyarakat. Meskipun tidak jarang perusahaan juga membuka kesempatan dialog dengan masyarakat, untuk menaksir lebih lanjut kebutuhan riil yang benar-benar diperlukan.

Tuntutan dan kebutuhan akan CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan, sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) terbaru. Adanya UUPT mengikat

industri atau korporasi-korporasi dengan kewajiban untuk melaksanakan CSR, tetapi kewajiban ini bukan sebuah beban yang memberatkan. Industri dan korporasi bekerja sama dengan pemerintah, berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.

SyaifaTania(2012:81)mengungkapkan bahwa dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia, sektor industri migas dan pertambangan merupakan sektor paling aktif melakukan aktivitas CSR. Hal ini dapat dimaklumi karena aktivitas dari industri migas memang rentan terhadap peningkatan pencemaran lingkungan yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian bukan berarti hanya perusahaan-perusahaan industri migas yang memiliki kewajiban lebih besar untuk melaksanakan CSR. Perusahaan-perusahaan lain juga memiliki kewajiban yang sama. Bahkan memiliki peran yang besar dalam memberikan dukungan pada negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini masyarakat Indonesia hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang. Tidak hanya itu saja tetapi juga dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Ini menunjukkan kecenderungan perubahan cara berpikir, gaya hidup, dan tuntutan masyarakat yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dikenal dengan tumbuhnya gerakan konsumen dari *vigilante consumerism* menjadi *ethical consumerism*. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan adalah menciptakan masyarakat yang beretika dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka akan berpikir ulang untuk menempatkan prioritas kebutuhan yang dianggap penting dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran S.M. Serad

(2012:5), bahwa secara internal manusia akan berupaya menjaga keseimbangan tubuh fisiknya untuk kebahagiaan, kesehatan, dan keberlanjutan hidupnya. Sedangkan secara eksternal manusia sebagai makhluk sosial melakukan kegiatan dan hubungan sosial, budaya, dan ekonomi, dengan orang lain serta lingkungannya.

Nunung Prajarto dan Radityo M. (2012:265) mengungkapkan pemetaan wujud CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yaitu:

**Pertama**, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDA) dalam bentuk bantuan di bidang pendidikan (beasiswa, kesertaan dalam kompetisi, sarana, dan prasarana sekolah), pelatihan (kegiatan, pendanaan, dan kesertaan), serta olahraga (penyiapan, pelatihan atlet, fasilitas, dan pendanaan kegiatan olahraga);

**Kedua**, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui pemberian bantuan modal awal, pelatihan manajerial, dan *soft skill* lainnya, serta menumbuhkan iklim bisnis bersama masyarakat;

**Ketiga**, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa contoh upaya tersebut antara lain peningkatan sarana dan prasarana air bersih, memberi pengobatan dan fasilitas kesehatan masyarakat, serta menyediakan prasarana transportasi;

**Keempat**, pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon di sejumlah daerah yang rawan bencana banjir, longsor, dan/atau kekeringan. Kegiatan reboisasi ini hanya salah satu bentuk pelestarian lingkungan untuk mengurangi jumlah karbondioksida dan penataan lingkungan hijau. Kegiatan CSR lainnya dilakukan dengan membangun prasarana pengolahan

limbah dan pencegahan pencemaran lingkungan;

**Kelima**, pemberian bantuan cepat pada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Beberapa perusahaan melanjutkan pemberian bantuan ini dengan mendampingi masyarakat untuk memulihkan perekonomiannya, bahkan mengupayakan pengadaan tempat tinggal dengan lingkungan yang sehat dan layak.

Dari kelima pemetaan tersebut, terlihat bahwa CSR di Indonesia memang belum banyak dirancang untuk keberlanjutan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Mayoritas CSR yang banyak dilakukan hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan, yang bersifat jangka pendek. Salah satu contoh: bibit pohon yang ditanam untuk pelestarian lingkungan tidak ada tindak lanjut pemeliharannya sehingga lebih banyak bibit pohon yang mati dibandingkan dengan bibit yang tumbuh bagi generasi selanjutnya.

Beberapa perusahaan di Indonesia mulai memikirkan keberlanjutan dari program CSR yang ditekankan baik pada kualitas maupun kuantitasnya. Perubahan yang diinginkan ialah perusahaan mulai menerapkan kebijakan dan program CSR yang inovatif sesuai dengan prinsip keberlanjutan tersebut. Tampaknya hal ini muncul sesuai dengan pemahaman perusahaan-perusahaan mengenai beberapa motivasi yang telah dikemukakan oleh Saidi dan Abidin. Tumbuhnya kesadaran itu tentu memberikan dampak positif bagi pelaksanaan CSR di Indonesia. Selain perusahaan tetap mempertahankan kelangsungan bisnisnya, mereka juga dapat memenuhi target untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya.

Dalam pelaksanaan CSR dengan pola tersebut di atas, maka setiap perusahaan

akan memilih dan mengadopsi beberapa pola yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Saidi dan Abidin (2004:85) mengemukakan beberapa pola yang banyak diterapkan di Indonesia saat ini, antara lain:

1. **Keterlibatan langsung**; Perusahaan yang menerapkan pola ini ialah perusahaan-perusahaan yang secara langsung melaksanakan CSR tanpa perantara atau kerja sama dengan pihak ketiga. Pola ini memungkinkan perusahaan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Perusahaan dengan pola ini telah menempatkan CSR sebagai bagian dari kebijakan strategi pemasaran, serta memiliki divisi penanganan CSR secara khusus contohnya Bank Mandiri.
2. **Melalui yayasan/organisasi sosial perusahaan**; Pola ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendirikan yayasan/ organisasi sosial di bawah pengawasannya. Yayasan/ organisasi sosial bersifat nonprofit dan memperoleh dana dari perusahaan yang menaunginya untuk kemudian melaksanakan CSR. Di Indonesia beberapa perusahaan yang melakukan pola ini adalah PT Raja Garuda Mas (Yayasan Tanoto Foundation), PT HM Sampoerna Tbk (Yayasan Sampoerna Foundation), dan PT DJarum (Yayasan DJarum).
3. **Bermitra dengan pihak lain**; Beberapa perusahaan ada yang menggunakan pola kerja sama dengan pihak lain seperti universitas, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, atau media massa, untuk melaksanakan CSR. Contoh: penerapan CSR bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), rumah sakit-rumah sakit dan universitas-universitas di Indonesia,

atau berbagai media massa elektronik dan nonelektronik.

4. **Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium;** Pola ini diterapkan oleh perusahaan yang menjadi anggota dari sebuah lembaga sosial atau konsorsium tertentu yang bergerak di bidang sosial. Pola ini yang cenderung diterapkan oleh banyak perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan strategi CSR-nya.

Penggunaan pola yang berbeda oleh setiap perusahaan hanya berujung pada satu tujuan yaitu melaksanakan CSR untuk menjamin keberlanjutan kontribusi positif baik pada perusahaan maupun masyarakat. Meskipun demikian harus diakui bahwa masih ada sebagian perusahaan dan masyarakat di Indonesia yang belum benar-benar memaknai pelaksanaan CSR secara utuh. Hal ini menyebabkan CSR dilakukan sebagai formalitas saja, sehingga muncul bias-bias tertentu yang kurang menyentuh kepentingan publik. Menurut Edi Suharto (2008) bias-bias tersebut antara lain:

1. **Kamufase,** merupakan bias yang terjadi karena perusahaan tidak sepenuhnya memahami dan melaksanakan konsep CSR, lebih cenderung bersifat formalitas dan menjadi alat untuk membentuk citra positif di mata publik.
2. **Generik,** merupakan bias yang terjadi karena aktivitas CSR yang dilakukan cenderung terlalu umum, kurang fokus, tidak inovatif, dan hanya berupa pengembangan program yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan lain.
3. **Directive,** merupakan bias yang terjadi karena aktivitas CSR yang dilaksanakan hanya didasarkan

pada kepentingan perusahaan saja tanpa mengedepankan kepentingan masyarakat.

4. **Lip service,** merupakan bias yang terjadi karena perusahaan menganggap telah melakukan aktivitas CSR. Padahal aktivitas yang dilakukannya hanya berupa tindakan karitatif yang jauh berbeda dari makna konsep sesungguhnya.
5. **Kiss and run,** merupakan bias yang dialami oleh perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR tanpa mengedepankan konsep keberlanjutan.

Kelima bias tersebut dapat diamati terjadi pada perusahaan-perusahaan yang masih mempertahankan pola pikir pada asumsi lama tentang CSR. Mereka cenderung menanggapi CSR hanya kegiatan yang menghabiskan dana perusahaan dan tidak memberikan keuntungan apapun. Syaifa Tania (2012:88) mengungkapkan bahwa:

“Paradigma lama yang menempatkan tanggung jawab perusahaan hanya sebatas upaya untuk memaksimalkan keuntungan finansial yang diraih perusahaan semata.” Konsekuensi dari paradigma ini menyebabkan pelaksanaan CSR tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga baik kontribusi positif dari perusahaan maupun pembangunan yang dilakukan bagi masyarakat sama-sama tidak dapat dirasakan.”

### **Manfaat CSR bagi Peningkatan Kualitas Hidup**

Sudut pandang yang lebih terbuka mengenai pemanfaatan CSR telah sampai pada tujuan peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini merujuk pada upaya pemanfaatan CSR secara berkelanjutan

agar program yang diberikan memberikan efek jangka panjang pada masyarakat. Meskipun CSR merupakan bagian dari komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pembangunan ekonomi berkelanjutan, namun CSR juga memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi secara proporsional dalam pencegahan kesalahan-kesalahan signifikan pada strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Sesuai dengan pendapat Elkington bahwa dalam menjalankan CSR, perusahaan wajib memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Keuntungan di sini harus dimiliki perusahaan agar tingkat profitabilitas memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan perusahaan dengan membuat kebijakan atau melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang.

Dana CSR dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan sebagainya. Ambadar (2008:35) mengungkapkan bahwa, “Manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, tabungan, konsumsi dan investasi dari rumah tangga warga masyarakat. Sedangkan menurut Rogovsky dalam Wibisono (2007:48) menunjukkan beberapa manfaat CSR sebagai berikut:

1. Manfaat bagi individu karyawan; CSR dapat digunakan sebagai metode pembelajaran alternatif dalam berbisnis, menghadapi tantangan pengembangan, berprestasi dalam lingkungan baru, mengembangkan keterampilan yang ada, memperoleh keterampilan baru, memperbaiki pengetahuan perusahaan tentang komunitas lokal, memberikan kontribusi bagi komunitas lokal, dan mendapatkan persepsi baru atas bisnis yang dilakukan.
2. Manfaat bagi penerima program; CSR dapat digunakan untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tidak dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk mengadakannya, mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah, dan memperoleh pengalaman dari organisasi besar sehingga menciptakan pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis.
3. Manfaat bagi perusahaan; CSR dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas kerja sama komunitas: peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas, meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal, meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi perusahaan.

Dari ketiga manfaat yang telah diuraikan, terlihat bahwa sebenarnya

perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitarnya dapat dilakukan dengan membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Hal ini merupakan suatu cara baru untuk memberikan manfaat CSR secara berkelanjutan pada masyarakat, dengan membangun potensi yang dimilikinya. Program-program CSR seharusnya memang dibuat dengan melibatkan masyarakat secara penuh, tidak hanya sebagai objek tetapi subjek pembangunan. Fokus utama yang harus diperhatikan adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya sehingga program CSR yang diberikan tidak sia-sia.

Sasaran bidang yang biasanya ditetapkan dalam prinsip CSR serupa dengan isi tesis Laswell (1958:29) tentang sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat diantaranya adalah kualitas hidup dan pendidikan. Ini dapat diartikan bahwa CSR dapat menjadi bagian penting dari sistem nilai yang harus ditopang oleh faktor kemampuan dan pengetahuan seseorang. Oleh karena itu CSR memang banyak bergerak pada program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Secara garis besar kita dapat mengelompokkan bentuk-bentuk pemanfaatan CSR dalam tiga besaran, yaitu:

1. Bantuan Fisik Program; Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana umum perusahaan menggunakan dana CSR untuk pembangunan jembatan dan jalan, perbaikan sekolah, perbaikan rumah ibadah, pembuatan pondok rapat, dan pengadaan air.
2. Bidang Kesehatan; Pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kesehatan masyarakat akan

berimplikasi pada kualitas kerja sehari-hari. Diasumsikan jika tingkat kesehatan warga rendah maka kinerja warga akan menjadi rendah. Salah satu contoh penyaluran dana CSR digunakan untuk pengadaan alat-alat atau perlengkapan di rumah sakit, tujuan yang diharapkan adalah masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

3. Bidang Pendidikan; Program bantuan untuk pendidikan yang telah berjalan adalah beasiswa bagi peserta didik berprestasi yang kurang mampu dan program bantuan untuk guru bantu. Program bantuan guru bantu adalah program bantuan dana kepada semua guru bantu yang bekerja di seluruh sekolah. Namun sangat disayangkan program tersebut kurang banyak diikuti para guru bantu karena sistem penerimaan bantuan terasa sulit dilakukan, terutama jika akses guru bantu menuju kantor perusahaan yang melakukan CSR cukup jauh.

Selain kekhususan CSR pada ketiga bidang tersebut, saat ini di bidang kesehatan dan pendidikan juga melakukan kolaborasi dalam memberikan CSR bagi masyarakat. Manfaat CSR dapat dirasakan melalui pemberian beasiswa dan asuransi kesehatan bagi pelajar berprestasi untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Tujuan yang diharapkan adalah orang tua siswa yang tidak mampu tidak perlu khawatir dengan biaya pendidikan dan kondisi kesehatan anaknya saat menjalani pendidikan di masa mendatang karena telah dijamin oleh program CSR. Namun perlu diwaspadai agar pemberian CSR tepat sasaran sehingga bagi siswa berprestasi yang benar-benar tidak mampu secara finansial dapat merasakan manfaatnya.

CSR yang diberikan perusahaan pada masyarakat diharapkan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi mampu memberikan kontribusi pada masyarakat dalam jangka panjang terutama terhadap peningkatan kualitas hidup dan lingkungan. Jika CSR dijalankan secara efektif sebenarnya dapat memperkuat akumulasi modal sosial yang secara tidak langsung potensial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Beberapa modal sosial yang dapat diidentifikasi secara umum, antara lain: kepercayaan, kohesivitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pelaksanaan CSR di Indonesia masih memerlukan dukungan modal sosial. Sebab selain mampu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, modal sosial juga mampu memperluas partisipasi dalam proses demokrasi sehingga program-program yang diberikan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Meskipun masih banyak pandangan negatif mengenai pelaksanaan CSR dan masih banyaknya motif-motif yang mendorong sebuah perusahaan dalam melaksanakan CSR, namun harus diakui bahwa CSR merupakan sebuah potensi besar dan nonpemerintah yang memerlukan dukungan bagi terciptanya transformasi kemandirian masyarakat.

## Simpulan

Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Saat ini perundang-undangan yang berlaku memberikan kesempatan bagi semua perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan kegiatan CSR.

Meskipun masih banyak perdebatan tentang perlu tidaknya pelaksanaan CSR diatur secara legal, tetapi tidak mengurangi semangat untuk terus berpikir positif bahwa CSR harus diakui sebagai salah satu potensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia. Utamanya dalam mendukung program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia.

CSR harus dilihat secara objektif bahwa kemunculannya merupakan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan pada lingkungan eksternalnya. Dengan demikian selain perusahaan tersebut mampu bertahan dengan aktivitas ekonominya, mereka juga tidak memutuskan hubungan dengan modal sosial yang diperolehnya dari masyarakat dan lingkungan. Satu pelajaran yang dapat diambil dari pemanfaatan CSR bagi peningkatan kualitas hidup manusia, yaitu adanya penekanan pada aspek kesukarelaan dan altruisme perusahaan dalam melakukan aktivitas CSR-nya sehingga mampu memelihara eksistensi perusahaan dan tanggung jawabnya pada manusia serta lingkungan sekitar.

## Saran

Pemanfaatan CSR selama ini memang belum dapat dirasakan secara berkesinambungan. Sebuah langkah konkret dibutuhkan untuk memfokuskan pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidangnya untuk mendukung jalannya pemanfaat CSR di Indonesia. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan tujuan tersebut, antara lain:

1. Pemerintah; Peran yang dilakukan pemerintah selama ini adalah sebagai koordinator dan pendamping perusahaan dalam melaksanakan peningkatan mutu kualitas hidup masyarakat sekitar. Meskipun selama ini pemerintah masih mengesampingkan peran tersebut dan hanya menjadi pihak yang memberikan izin pada perusahaan-perusahaan untuk beroperasi. Namun sesungguhnya peran pemerintah adalah ujung tombak yang menentukan apakah program CSR tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat atau hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Tidak hanya itu saja bahkan pemerintah juga menjadi pengawas dan penasihat perusahaan dalam pelaksanaan program CSR. Peran ini sebaiknya diperkuat dan dilaksanakan secara berkesinambungan agar program-program CSR yang dilakukan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Peran yang dilakukan LSM saat ini memang terlihat lebih besar kontribusinya sebagai pengawas jalannya CSR dibandingkan dengan peran yang dilakukan pemerintah. Hal ini harus mulai diubah dengan

mengembangkan kemitraan dengan pemerintah. Misalnya bersama pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberikan apresiasi yang tinggi, pada kalangan yang ingin terlibat langsung dengan program CSR. Kerja sama ini memiliki dampak positif yang lebih banyak untuk benar-benar memanfaatkan CSR, sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan antara kedua pihak ketika CSR dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ambadar J. 2008. *CSR dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Elkington, John. 1998. *Canibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business*. Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
- Felce, D., & Perry, J. (1995). Quality of life: Its definition and measurement 1. *Research in developmental disabilities, 16*(1).
- Moon G, et al., 2004. The demographic and social class basis of inequality in self reported morbidity: an exploration using the Health Survey for England. *Journal Of Epidemiology And Community Health 58*(4).
- Prajarto, Nunung dan M., Radityo. 2012. *Lihatlah CSR-nya*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Saidi, Zaim dan Abidin, Hamid. 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedewasaan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia.
- Serad, S.M. 2012. *Pembangunan dan CSR: Landasan dan Arah*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.

- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2008. *Corporate Social Responsibility: What is and Benefit for Corporate*. Makalah disajikan pada seminar Dua Hari *Corporate Social Responsibility: Strategy, Management, and Leadership*. Intipesan: Hotel Aryaduta. Jakarta 13-14 Februari.
- Tania, Syaifa. 2012. *Corporate Social Responsibility di Indonesia: Prinsip dan Aplikasi*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Wibisono Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.

### **Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Internet**

- “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.” [http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan), diakses tanggal 17 Juli 2012.
- “Kriteria Pengukuran Kualitas Hidup,” [http://id.kawalborneo.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=84:kriteria-pengukuran-kualitas-hidup-kualitas-taraf-hidup-&catid=37:berita&Itemid=60](http://id.kawalborneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84:kriteria-pengukuran-kualitas-hidup-kualitas-taraf-hidup-&catid=37:berita&Itemid=60), diakses tanggal 30 Juni 2012.

### **Surat Kabar**

Faturochman. *Kualitas Manusia: Sumber Utama Pembangunan*, dalam *Yogya Pos*, 7 Agustus 1990.

